

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH)  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DINAS TENAGA KERJA  
KOTA JAYAPURA SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Oleh :**

**Ratri Ulyawarti Ningrum, Irfan Uluputty, S.STP, M.Si, Suraji, S.Sos, M.AP  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
E-mail : [ratriningrum07@gmail.com](mailto:ratriningrum07@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Work From Home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama pandemi Covid-19. Riset Terapan Pemerintahan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan WFH bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Data yang diperoleh dalam riset kualitatif ini melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil riset menunjukkan bahwa fokus penelitian belum berjalan dengan efektif. Terbukti dari pengaturan sistem kerja yang belum diatur dengan jelas, koordinasi pekerjaan yang sulit dilakukan, dan tanggung jawab kerja yang tidak maksimal. Mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan pengaturan sistem kerja yang jelas berdasarkan perintah pimpinan, pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan prestasi kerja, dan menjaga komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai agar memastikan pelaksanaan tugas kerja tetap berjalan baik.

**Kata kunci : WFH, Tugas Kerja, PNS**

***ABSTRACT***

Work From Home (WFH) for Civil Servants (PNS) is a form of government effort to ensure public services continue to run during the Covid-19 pandemic. This Government Applied Research aims to determine the success of WFH implementation for civil servants at the Jayapura City Manpower Office. The data obtained in this qualitative research through interview, observation and documentation techniques, then analyzed by descriptive analysis technique consisting of data reduction, data presentation, conclusion and data verification. The research results show that the research focus has not been effective. It is evident from the arrangement of the work system that has not been clearly regulated, coordination of work that is difficult to do, and work responsibilities that are not optimal. Overcoming these obstacles, it is necessary to set up a clear work system based on the leadership's orders, provide rewards and punishments to improve work performance, and maintain good communication between the leadership and employees to ensure that the implementation of work tasks continues to run well.

**Keywords : *Work From Home* (WFH), *Work Assignments*, *State Civil Apparatus* (PNS)**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang diakibatkan oleh jenis Coronavirus baru yaitu *Sars-CoV-2*. Penetapan tersebut mendorong Pemerintah Indonesia memilih opsi untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengatasi penularan Covid-19, yang disampaikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.<sup>1</sup>

Pemerintah tetap memastikan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah tetap berjalan efektif dengan mengeluarkan kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama merebaknya kasus Covid-19.<sup>2</sup> Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.<sup>3</sup>

Kebijakan yang ditetapkan Kementerian PANRB tersebut membuktikan bahwa WFH bukan menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja bagi PNS sebagai pelayan publik. Terobosan Pemerintah untuk menyelenggarakan WFH merupakan tantangan bagi PNS untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas kerja dan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19., n.d.

<sup>2</sup> “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Dengan Kerja Di Rumah Bagi ASN,” accessed September 27, 2020, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn>.

<sup>3</sup> Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipi Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, n.d.

<sup>4</sup> “Covid-19 Dan Upaya Pemerintah Dalam Mengelola PNS,” accessed September 27, 2020, <http://kanreg1bkn.id/bknjogja/artikel/0/2020/04/covid19-dan-upaya-pemerintah-dalam-mengelola-pns>.

Penerapan konsep WFH membutuhkan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas diantaranya koordinasi kerja, sarana prasarana kerja, jaringan internet, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Faktor pendukung tersebut membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas kerja pada sistem kerja yang baru, sehingga penulis tertarik mengangkat topik riset mengenai “Pengaturan Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil selama pandemi Covid-19”.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Bagaimana efektivitas pelaksanaan WFH bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura selama pandemi covid-19. Sistem pelaksanaan WFH di Dinas Tenaga Kerja terkait penetapan keterwakilan pegawai yang melaksanakan WFH maupun yang bekerja di kantor tidak didasarkan pada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas dan hanya berpedoman pada SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, SE Badan Kepegawaian Negara dan SE Pemerintah Provinsi Papua.

Tidak adanya pengaturan sistem kerja menjadi masalah terkait pengaturan penetapan keterwakilan pegawai yang akan berdampak pada produktivitas kerja. Tanpa Surat Perintah Tugas membuat pegawai menjadi tidak disiplin dalam melaksanakan tugas kerjanya masing-masing pada masa pandemi Covid-19.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks Efektivitas Pelaksanaan *Work From Home* bagi Pegawai Negeri Sipil. Riset sebelumnya dengan judul “Pengaruh *Work From Home* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara” meneliti bahwa konsep WFH memberikan pengaruh dampak yang positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya rasa kesetiaan dan integritas ASN sehingga semangat kinerja

individu lebih meningkat serta pekerjaan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien baik dari segi finansial, waktu dan tenaga.<sup>5</sup>

Riset selanjutnya dengan judul “Penerapan Sistem WFH (Work From Home) dan Dampaknya terhadap Kinerja Staf dan Dosen Unipdu Jombang selama Pandemi Covid-19” menyatakan bahwa dengan melakukan penjadwalan hingga menjaga sifat kekeluargaan dalam melaksanakan tugas kerja oleh pegawai dapat membuktikan penerapan WFH tidak membuat kinerja pegawai mengalami penurunan kualitas kerja.<sup>6</sup> Riset berikutnya dengan judul “Produktivitas Kerja Pegawai yang Dipengaruhi oleh Work From Home (WFH) dan Lingkungan Kerja Selama Masa Pandemi” menjelaskan bahwa peningkatan WFH akan berpengaruh pada produktivitas kerja yang berasal dari lingkungan kerja. Lingkungan tempat kerja di rumah membuat pegawai lebih nyaman dan mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan.<sup>7</sup> Riset terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari riset sebelumnya, penulis tidak menemukan judul riset yang sama seperti judul riset penulis.

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan riset yang berbeda dan belum dilakukan oleh riset terdahulu, dimana konteks riset yang dilakukan lebih terfokus kepada keberhasilan dari sistem kerja pelaksanaan WFH bagi PNS selama pandemi Covid-19, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari riset terdahulu yakni sistem kerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yakni penyesuaian sistem kerja, penyelenggaraan kegiatan rapat dan perjalanan dinas,

---

<sup>5</sup> Rezeky Ana Ashal, “Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 223.

<sup>6</sup> Ririn Susilawati Suspahariati, “Penerapan Sistem WFH (Work From Home) Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Staf Dan Dosen Unipdu Jombang Selama Pandemi Covid-19,” *Manajemen dan Pendidikan Islam* 6 (2020): 229–240.

<sup>7</sup> Bintang Narpati; Indra Lubis; Kardinah Indriana Meutia; Endah Prawesti Ningrum, “Produktivitas Kerja Pegawai Yang Dipengaruhi Oleh Work From Home (WFH) Dan Lingkungan Kerja Selama Masa Pandemi,” *Ilmiah Manajemen Forkamma* 4 (2021): 121–133.

serta penerapan standar kebersihan.<sup>8</sup> Indikator tersebut kemudian diukur dengan tolak ukur penilaian efektivitas guna mengukur keberhasilan dari sistem kerja tersebut yang terdiri dari pencapaian tujuan pegawai, kemampuan pegawai untuk beradaptasi, kepuasan kerja pegawai, dan tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>9</sup>

## 1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan keberhasilan pelaksanaan WFH bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja selama pandemi covid-19, Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan WFH bagi pegawai pada sistem kerja yang baru.

## 1.6 Kajian Teori

### Konsep Sistem Kerja

Gagasan sistem kerja dijelaskan oleh Sitalaksana, Ruhana Anggawisastra, Jann H. Tjakraatmadja bahwa sistem kerja adalah suatu kesatuan yang meliputi unsur-unsur manusia, alat, bahan, metode kerja serta lingkungan kerja guna mencapai tujuan tertentu. Sistem kerja sebagai rangkaian prosedur kerja yang dipadukan dalam rangka melakukan pekerjaan untuk menghasilkan benda atau jasa demi mendapatkan keuntungan perusahaan/organisasi.<sup>10</sup>

### Work From Home (WFH)

Ide yang dijelaskan oleh Oswar Mungkasa bahwa *work from home* adalah konsep bekerja jarak jauh atau dikenal dengan istilah *telecommuting*.<sup>11</sup> Kemudian

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

<sup>9</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan, *Cetakan Kedua*, (2007), *Manajemen Publik*, Jakarta. Grasindo, n.d.

<sup>10</sup> and M T Berry Yulindra Hilma Raimona Zadry, Eng Lusi Susanti, *Analisis Dan Perancangan Sistem*, 2015.

<sup>11</sup> Oswar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19," *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 126–150.

ditambahkannya WFH sebagai bekerja jarak jauh dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Bekerja dari rumah (*telecommuting*);
2. Bekerja yang dilakukan melalui kantor cabang atau kantor satelit (*satellite offices*);
3. Bekerja dimana saja sesuai kebutuhan (*mobile work*).<sup>12</sup>

### **Makna dan Konsep Efektivitas**

Konsep efektivitas ditambahkan oleh Hessel Nogi S Tangkilisan dengan mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi yang bisa dijadikan tolak ukur dalam mengukur efektivitas antara lain yaitu dengan mengukur sejauh mana target yang telah ditentukan oleh organisasi dapat tercapai, kemampuan pegawai untuk beradaptasi, bagaimana kepuasan kerja pegawai, dan tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>13</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode di dalam riset penulis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data riset dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data riset kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan WFH bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura merupakan upaya tindaklanjut pemerintah dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

---

<sup>12</sup> Oswar Mungkasa, "Bekerja Jarak Jauh (Telecommuting): Konsep, Penerapan Dan Pembelajaran," *Bappenas Working Papers* 3, no. 1 (2020): 1–32.

<sup>13</sup> Tangkilisan, *Cetakan Kedua*, (2007).

Surat Edaran di atas menjadi dasar pedoman pelaksanaan WFH di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura selama 14 hari kedepan, yang di mulai pada tanggal 20 Maret 2020. Tujuan pelaksanaan WFH selama 14 hari tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah mencegah kluster Covid-19 di lingkungan Perangkat Daerah (PD) masing-masing, dengan tetap melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan. Pemerintah Kota Jayapura kemudian kembali memperpanjang masa pelaksanaan WFH selama 14 hari terkecuali PNS dengan jabatan fungsional eselon II, III, dan IV untuk tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor.

### **3.1 Penyesuaian Sistem Kerja Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura**

Penyesuaian sistem kerja bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja. Kegiatan yang dilakukan adalah mengatur mekanisme pelaksanaan WFH bagi pegawai termasuk keterwakilan pegawai. Keterwakilan pegawai yang dimaksud adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah dan yang harus bekerja di kantor.

Penetapan keterwakilan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah hanya pegawai staf dan honorer sebanyak 90%, sedangkan pegawai yang tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor adalah sebanyak 10% yang terdiri atas pegawai dengan jabatan fungsional baik eselon II, III, dan IV.<sup>14</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa Penetapan keterwakilan pegawai yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja tanpa adanya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan hanya mengikuti himbuan Surat Edaran dari Pemerintah. Pegawai staf dan honorer yang melaksanakan WFH dapat sewaktu-waktu dipanggil untuk datang ke kantor apabila ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor.

Laporan pelaksanaan tugas pegawai Dinas Tenaga Kerja selama masa WFH dilakukan melalui pesan pribadi *WhatsApp*<sup>15</sup> kepada Kepala Sub Bagian dan

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Nomor 15/SE/VI/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, n.d.

<sup>15</sup> Sebuah aplikasi perpesanan instan pada *smartphone* untuk mengirim dan menerima pesan dengan koneksi internet tanpa menggunakan pulsa, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>

Kepala Bidang masing-masing untuk diteruskan kepada Kepala Dinas. Pelaksanaan tugas juga dapat dilaporkan melalui *email* dinas dengan melampirkan hasil kerjanya dalam bentuk dokumen *Portable Document Format* (PDF)<sup>16</sup>. Kegiatan ini mendorong pegawai agar dapat memanfaatkan media elektronik, sehingga pegawai yang sebelumnya tidak menggunakan *smartphone*<sup>17</sup> berbasis *android*<sup>18</sup> saat pelaksanaan WFH mereka belajar mengoperasikannya untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan serta mengisi segala aktivitas kerja yang dilakukan selama bekerja dari rumah.

### **3.2 Penyelenggaraan Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura**

Kegiatan rapat dan perjalanan dinas pegawai. Rapat koordinasi antara Kepala Dinas bersama pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dilakukan pada awal tahun, sedangkan rapat evaluasi kinerja dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan rapat koordinasi, pengawasan dan evaluasi program kerja setiap bulannya hanya dilakukan oleh pegawai pada masing-masing bidang.

Kegiatan rapat bagi pegawai yang melaksanakan kerja dari rumah dilakukan sekali melalui aplikasi *Zoom Meeting*<sup>19</sup>. Mekanisme rapat berikutnya dilakukan melalui pemberian arahan dan penyampaian dari kepala Dinas Tenaga Kerja kepada kepala-kepala bidang untuk selanjutnya diteruskan kepada tiap-tiap pegawai dalam bidang tersebut melalui pesan *Whatsapp*.

Hasil dokumentasi yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai Dinas Tenaga Kerja juga dilakukan sebelum kondisi pandemi Covid-19 yaitu pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020. Anggaran perjalanan dinas pegawai yang kemudian dialihkan untuk membantu mendanai penanganan Covid-19 di Kota Jayapura. Pengalihan

---

<sup>16</sup>Jenis format dokumen untuk kepentingan pertukaran dokumen digital, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-pdf.html>

<sup>17</sup> Telepon genggam yang di dalamnya terdapat berbagai fitur internet, email, dan lainnya dan memiliki kemampuan seperti komputer, <https://tekno.foresteract.com/smartphone/>

<sup>18</sup> Sebuah sistem operasi yang dirancang khusus untuk dipasangkan pada perangkat *smartphone*, <https://tekno.foresteract.com/android/>

<sup>19</sup> Sebuah aplikasi video *conference* untuk melakukan pertemuan tanpa tatap muka melalui jaringan internet pada komputer atau *smartphone*, <https://www.utopicomputers.com/apa-itu-aplikasi-zoom-meeting-pengertian-dan-fungsinya/>



anggaran perjalanan dinas tersebut mengakibatkan kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai Dinas Tenaga Kerja ditiadakan sejak kondisi pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020.

### **3.3 Penerapan Standar Kebersihan bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura**

Penerapan standar kebersihan oleh pegawai. Hasil wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa pegawai yang melaksanakan WFH harus selalu memberikan laporan terkait kesehatan diri masing-masing kepada pimpinan, sehingga pimpinan dapat mengetahui kesehatan para pegawai dan memastikan pegawai tetap berada di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

Teknik observasi penulis terhadap penerapan protokol kesehatan oleh pegawai di kantor menunjukkan bahwa PNS Dinas Tenaga Kerja dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan Regulasi.<sup>20</sup> Pegawai telah menjalankan anjuran program 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) dari pemerintah untuk menjaga diri dari paparan virus *corona*.

Pencari Kerja (Pencaker) yang ingin membuat kartu kuning diharuskan memakai masker saat mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja. Proses penyelesaian masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha mengenai masalah upah ataupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

Hasil pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja telah menyediakan tempat cuci tangan serta pengadaan sarung tangan dan handsinitizer yang dikhususkan untuk pegawai pada bagian Pencari Kerja (Pencaker) dan bagian Hubungan Industrial (HI) yang langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan masyarakat. Fasilitas tersebut sebagai upaya Dinas Tenaga Kerja untuk

---

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pand, n.d.

melindungi pegawai yang memberikan pelayanan agar terhindar dari paparan Covid-19.

Pegawai Dinas Tenaga Kerja yang tidak mematuhi protokol kesehatan diberikan sanksi berupa teguran langsung oleh pimpinan kantor. Teguran tersebut diberikan agar pegawai meningkatkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Kesadaran akan pentingnya menjaga protokol kesehatan akan dirasakan juga oleh masyarakat yang memperhatikan perilaku pegawai dalam mematuhi protokol kesehatan.

### **3.4 Pencapaian Tujuan yang Dihasilkan PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura**

Capaian tugas kerja oleh PNS Dinas Tenaga Kerja juga dapat dilihat dari hasil dokumentasi penulis pada Buku Kerja Harian Pegawai yang memuat laporan kerja harian pegawai setiap harinya. Pada tahun 2020 pengisian aktivitas kerja harian pegawai tidak lagi diisi dalam Buku Kerja Harian, melainkan pengisian dilakukan pada *website*<sup>21</sup> Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan dan Remunerasi Berbasis Kinerja (Si-BTM), dimana aktivitas tersebut diisi sendiri oleh pegawai setiap harinya.

Pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja sudah mencapai sasaran sesuai dengan Surat Edaran.<sup>22</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ditengah Pandemi Covid-19 pegawai mampu meningkatkan nilai prestasi kerja pada sistem kerja yang baru. Pegawai yang melaksanakan WFH juga tetap dihimbau agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat mencapai sasaran program/kegiatan yang diharapkan dan berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

### **3.5 Kemampuan Beradaptasi Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura**

---

<sup>21</sup> Sekumpulan halaman pada internet yang saling berhubungan untuk menyediakan informasi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Situs\\_web](https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web)

<sup>22</sup> Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, n.d.

Rencana kerja yang berhasil dicapai menunjukkan bahwa pegawai dapat bekerja dan menguasai bidang pekerjaannya masing-masing. Dinas Tenaga Kerja belum pernah mendapatkan teguran langsung dari Walikota Jayapura dalam rapat-rapat yang diselenggarakan bersama PD lainnya terkait kinerja pegawai dan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dinas Tenaga Kerja selalu berkomitmen agar terus meningkatkan secara signifikan pencapaian kinerja baik personal maupun institusi, melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dan memastikan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan tugas kerja pada sistem kerja yang baru adalah sebagian PNS Dinas Tenaga Kerja yang belum menggunakan *smartphone* berbasis *android* terlambat mendapatkan informasi terkait tugas kerja yang disampaikan atasan melalui pesan grup pada aplikasi *Whatsapp*. Keterlambatan informasi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan kepada pegawai menjadi tertunda, namun hal ini mendorong PNS Dinas Tenaga Kerja terus berkomitmen meningkatkan kinerja dan kompetensi pegawai ditengah pandemi Covid-19.

### **3.6 Kepuasan Bekerja Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura**

kepuasan bekerja yang dirasakan oleh PNS Dinas Tenaga Kerja masih belum terpenuhi. Beberapa pegawai yang tidak masuk kantor akan berdampak pada kondisi kerja yang membuat pekerjaan kantor menjadi tertunda. Hubungan kerja yang dirasakan pegawai juga berbeda saat kondisi pandemi, dikarenakan koordinasi pekerjaan yang sulit dilakukan. Membangun hubungan komunikasi antar pegawai merupakan salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja untuk mencegah terjadinya *miss communication* antara satu dengan yang lain khususnya saat pelaksanaan WFH. Hubungan komunikasi harus selalu terjaga untuk memastikan tugas kerja yang akan dikerjakan lebih mudah dipahami dan diselesaikan tepat waktu.

### **3.7 Tanggung Jawab PNS Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Dalam Bekerja**

Tanggung jawab yang dimiliki PNS Dinas Tenaga Kerja ditengah pandemi Covid-19 masih belum baik dan tidak sesuai dengan Regulasi.<sup>23</sup> Terbukti bahwa beberapa pegawai yang masih tidak bijak dalam mematuhi peraturan jam kerja kantor, disamping itu untuk menghindari penyebaran Covid-19 Pemerintah menghimbau agar pegawai dalam melakukan absensi tidak lagi menggunakan *fingerprint* melainkan kembali memberlakukan absensi manual yang diisi oleh masing-masing pegawai pada jam masuk dan pulang kantor. Demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan kembali absensi manual akan menjadi faktor utama dari menurunnya tingkat kedisiplinan pegawai yang kemudian akan berdampak pada tingkat totalitas kerja PNS Dinas Tenaga Kerja.

### **3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan WFH di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura belum dapat diatur dengan baik terkait pengaturan sistem kerja. Terbukti dari pengaturan sistem kerja yang belum diatur dengan jelas, koordinasi pekerjaan yang sulit dilakukan, dan tanggung jawab kerja yang tidak maksimal. PNS di Dinas Tenaga Kerja mampu mencapai sasaran program/kerja yang direncanakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ditengah Pandemi Covid-19 pegawai berusaha meningkatkan prestasi kerja pada sistem kerja yang baru. Mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan pengaturan sistem kerja yang jelas berdasarkan perintah pimpinan, pemberian *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan prestasi kerja, dan menjaga komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai agar memastikan pelaksanaan tugas kerja tetap berjalan baik.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil riset yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan WFH bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura belum berjalan dengan baik, terbukti dari pengaturan sistem kerja terkait penetapan keterwakilan pegawai belum berlandaskan pada surat perintah tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja.

---

<sup>23</sup> Surat Edaran Nomor 15/SE/VI/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pelaksanaan kegiatan rapat dan perjalanan dinas bagi pegawai tidak efektif dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan rapat pegawai dibatasi dengan penerapan protokol kesehatan dan anggaran perjalanan dinas pegawai dialihkan untuk kepentingan pendanaan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan oleh pegawai sudah dilakukan dengan baik dan didukung dengan pemberian fasilitas juga dilakukan untuk menunjang kebersihan dan kesehatan pegawai dalam mencegah penyebaran virus *corona*. Pegawai mampu mencapai sasaran program/kerja yang direncanakan serta mampu menguasai bidang kerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Kondisi kerja dan hubungan kerja di antara pegawai saat kondisi pandemi belum dikatakan baik, akibat dari pegawai sulit berkoordinasi dalam melaksanakan tugas kerjanya masing-masing. Tanggung jawab pegawai dalam bekerja dinilai tidak maksimal yang berdampak pada rendahnya totalitas kerja pegawai.

### **Saran**

Saran penulis terhadap hasil riset adalah agar penetapan keterwakilan PNS yang melaksanakan WFH maupun yang tetap bekerja di kantor untuk diatur secara jelas melalui surat perintah tugas dari pimpinan kantor. Pelaksanaan rapat saat pelaksanaan WFH sebaiknya dilakukan melalui video conference, sehingga pembahasan koordinasi dan evaluasi kerja dapat dibahas dengan jelas oleh pimpinan dan pegawai kantor. Memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang belum mematuhi protokol kesehatan saat bekerja. Pegawai yang telah menunjukkan dedikasi kerja yang baik untuk diberikan *reward*. Pemberian informasi tugas kerja kepada pegawai untuk tidak hanya dilakukan melalui *Whatsapp*. Pimpinan kantor harus menjaga komunikasi dengan semua pegawai. Memberikan *punishment* kepada PNS yang melanggar aturan kerja yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Hilma Raimona Zadry, Eng Lusi Susanti, and M T Berry Yuliandra. *Analisis Dan Perancangan Sistem*, 2015.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Cetakan Kedua,(2007). Manajemen Publik, Jakarta. Grasindo.*

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19., n.d.*

*Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, n.d.*

*Surat Edaran Nomor 15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, n.d*

*Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, n.d.*

*Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, n.d.*

### C. JURNAL

Ashal, Rezeky Ana. "Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 223.

- Mungkasa, Oswar. "Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19." *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 126–150.
- . "Bekerja Jarak Jauh (Telecommuting): Konsep, Penerapan Dan Pembelajaran." *Bappenas Working Papers* 3, no. 1 (2020): 1–32.
- Ningrum, Bintang Narpati; Indra Lubis; Kardinah Indriana Meutia; Endah Prawesti. "Produktivitas Kerja Pegawai Yang Dipengaruhi Oleh Work From Home (WFH) Dan Lingkungan Kerja Selama Masa Pandemi." *Ilmiah Manajemen Forkamma* 4 (2021): 121–133.
- Suspahariati, Ririn Susilawati. "Penerapan Sistem WFH (Work From Home) Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Staf Dan Dosen Unipdu Jombang Selama Pandemi Covid-19." *Manajemen dan Pendidikan Islam* 6 (2020): 229–240.

#### **D. INTERNET**

- "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Dengan Kerja Di Rumah Bagi ASN." Accessed September 27, 2020. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn>.
- "Covid-19 Dan Upaya Pemerintah Dalam Mengelola PNS." Accessed September 27, 2020. <http://kanreg1bkn.id/bknjogja/artikel/0/2020/04/covid19-dan-upaya-pemerintah-dalam-mengelola-pns>.
- "Pengertian WhatsApp Beserta Sejarah, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan WhatsApp." Accessed April 27, 2021. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>
- "Pengertian PDF dan Fungsinya, Kegunaan, Contoh, Kelebihan PDF." Accessed April 27, 2021. <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-pdf.html>
- "Smartphone (Ponsel Cerdas): Pengertian, Jenis, Merek, dan Dampak." Accessed April 27, 2021. <https://tekno.foresteract.com/smartphone/>

“Android (Sistem Operasi): Pengertian, Sejarah, dan Nama Versi.” Accessed April 27, 2021. <https://tekno.foresteract.com/android/>

“Apa Itu Aplikasi Zoom Meeting ? Pengertian Dan Fungsinya.” Accessed April 27, 2021. <https://www.utopicomputers.com/apa-itu-aplikasi-zoom-meeting-pengertian-dan-fungsinya/>

“Situs web - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed April 27, 2021. [https://id.wikipedia.org/wiki/Situs\\_web](https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web)